

PERANAN MASYARAKAT TIONGHOA DALAM PERDAGANGAN PEREKONOMIAN DI KOTA BINJAI PADA TAHUN 1968-2008

Oleh :

Daniel Halomoan Ginting*

Trisni Andayani**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Kota Binjai. Kemudian mengetahui bentuk dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008. Dari hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa kedatangan masyarakat etnis Tionghoa secara besar-besaran ke Kota Binjai diawali dengan pembangunan perkebunan tembakau di Deli, Langkat dan Serdang (1864–1870). Di Binjai mereka memulai kehidupannya baik sebagai kuli, juru masak, jongos, kerani hotel maupun sebagai pedagang yang berasal dari suku Punti, Hakloe, Hokkian, Hailam dan Hakka. Bentuk dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008 adalah kontekstual dengan fungsi eksistensi. Dalam fungsi tersebut, ada unsur positif dan negatif yang muncul, antara masyarakat etnis Tionghoa dan Bumi Putera, secara timbal balik. Fungsi tersebut berkaitan dengan peran positif dan peran negatif yang sangat dibiarkan oleh sejarah, lingkungan, prasangka, dan masalah-masalah sektoral berdasar kepentingan sesaat atau lokal. Peran dan posisi etnis Tionghoa yang beroperasi di dunia perdagangan perekonomian tersebut pada dataran lebih luas memperlihatkan identitas yang hendak dibangun. Dimana identitas ini terkait dengan ideologi, kuasa ekonomi, kultur dagang, budaya, dan posisi stereotipe yang telah berlangsung lama.

Kata Kunci: Masyarakat, Tionghoa, Perdagangan dan Perekonomian

A. Pendahuluan

Leluhur orang Tionghoa berimigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu melalui kegiatan perniagaan. Peran mereka beberapa kali muncul dalam sejarah Indonesia, bahkan sebelum Republik Indonesia dideklarasikan dan terbentuk. Catatan-catatan dari Tiongkok menyatakan bahwa kerajaan-kerajaan di Nusantara telah berhubungan erat dengan dinasti-dinasti yang berkuasa di Tiongkok. Faktor inilah yang kemudian menyuburkan perdagangan dan lalu lintas barang maupun manusia dari Tiongkok ke Nusantara.

* Alumni Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED

** Dosen Prodi. Pend. Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, UNIMED

Fungsi orang Tionghoa dalam dunia perekonomian telah terasa berabad-abad yang lampau. Fungsi ini erat berhubungan dengan jati diri suatu wirausaha di bidang perekonomian. Di samping itu konteks interaksi sosial budaya dan politis yang telah berabad-abad lamanya, akan mengkristal memupuk jati diri seorang Tionghoa di tanah air dan masyarakat besar Indonesia. Barang tentu ini bersifat positif atau pun negatif bagi suatu komunitas tertentu. Suatu contoh dengan aplikasi pada interaksi etnik di Kotamadya Binjai, melengkapi pemikiran kontekstual ini.

Di Kotamadya Binjai etnis Tionghoa merupakan salah satu warga yang mempunyai pengaruh sangat besar dalam bidang perekonomian khususnya perdagangan. Mereka telah menjadi dominan dalam perdagangan di setiap sudut kota Binjai, dan etnis Tionghoa ini telah banyak menguasai perekonomian dalam jalur perdagangan. Bahkan kini pengaruhnya tidak hanya sebatas Kota Binjai saja, namun sudah sampai ke seluruh Indonesia.

Sebagaimana uraian pada latar belakang masalah bahwa kajian tentang masyarakat etnis Tionghoa memiliki rentang kajian yang relatif luas. Oleh karena itu, dibuat pembatasan masalah yang terbatas pada : Peran masyarakat Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008. Mengingat luasnya cakupan masalah yang menyangkut peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan, maka peneliti merasa perlu mengadakan perumusan masalah untuk mempermudah beberapa kajian dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut : 1) Bagaimana sejarah kedatangan masyarakat etnis Tionghoa ke Kota Binjai. 2) Bagaimana bentuk dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, karena berhadapan dengan kenyataan menyajikan secara langsung hakikat hubungan peneliti dengan kajian yang di teliti. Dalam penelitian ini diupayakan mengungkap peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, cara atau tehnik penelitiannya membuat deskripsi sejelas-jelasnya mengenai yang diteliti serta menerangkan secara fakta karakteristik populasi di lapangan.

Sesuai dengan data dan judul penelitian ini maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Kotamadya Binjai. Alasan peneliti menetapkan lokasi tersebut karena lokasi ini banyak ditemukan masyarakat etnis Tionghoa berprofesi sebagai pedagang

yang telah lama menetap di Kota Binjai. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Tionghoa yang berprofesi sebagai pedagang dan bertempat tinggal di Kotamadya Binjai. Dalam penelitian ini besarnya sampel dilakukan secara purposive sample atau sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dimana informan berjumlah 23 orang, dengan kriteria menjadi sampel adalah etnis Tionghoa yang menjadi pedagang di Kota Binjai dalam kurun waktu 1968-2008.

Untuk mengusahakan tercapainya hasil penelitian, maka alat pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah : 1) Studi pustaka yaitu untuk melengkapi tehnik pengumpulan data sebagai pelengkap akan digunakan suatu studi pustaka, untuk memperoleh pengetahuan teoritis para ahli dari berbagai literatur. 2) Wawancara yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan para informan yang sudah ditentukan, yakni masyarakat etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi yang berprofesi sebagai pedagang.

Untuk menganalisis data maka dilakukan beberapa tahapan yaitu: 1) Data yang telah dihimpun dengan cara observasi, wawancara kemudian dikelompokkan sesuai dengan topik permasalahan yang akan diteliti. 2) Setelah data dikelompokkan, kemudian data dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana data-data yang diperoleh berupa hasil observasi dan wawancara dideskripsikan ke dalam bentuk tulisan kemudian dianalisa secara mendalam dan disesuaikan dengan karakteristiknya (Moleong, 2000:84). 3) Setelah data dianalisis, maka langkah terakhir adalah menyajikan (rekonstruksi) kembali fakta-fakta dalam suatu cara yang dapat menarik perhatian pembaca, sehingga mampu mendeskripsikan fenomena atas rumusan masalah penelitian.

C. Pembahasan Penelitian

1. Latar Belakang Perekonomian Binjai.

Sejak abad yang silam Binjai telah tumbuh dengan pesat, dengan interaksi Tionghoa dan pribumi tetap berlangsung. Namun nampak bahwa Tionghoa khusus beraktivitas pada bidang perdagangan atau bidang lain yang ada hubungannya dengan perdagangan. Hal ini selalu mengacu pada pertumbuhan sepanjang sejarah Binjai. Namun nama Tionghoa selalu banyak terkait dengan bidang umum pada perdagangan *home industry* atau industri sejauh terkait dengan perdagangan, sedangkan di bidang-bidang lain selalu terkait pada kelompoknya sendiri misalnya keagamaan, adat istiadat, kawasan. tempat tinggal, dan seterusnya. Selanjutnya di bidang pemerintahan jaringan lalu lintas, terminal dan angkutan, kelompok Tionghoa tidak banyak.

Daerah komersial dan pusat perekonomian serta pusat pemerintahan terutama berpusat di wilayah Kecamatan Binjai Kota. Kawasan perindustrian dipusatkan di daerah Binjai Utara, sedangkan di sebelah timur dan selatan adalah daerah konsentrasi pertanian. Daerah pengembangan peternakan dipusatkan di kawasan Binjai Barat. Kawasan Industri Binjai di Kecamatan Binjai Utara direncanakan di Kelurahan Cengkeh Turi dengan luas wilayah 300 ha. Pasar Tavip yang merupakan pasar tradisional terbesar di Binjai serta pusat perbelanjaan seperti, Binjai Supermall, Suzuya, Mini Market Tahiti dan lainnya berkembang berdasar daerah strategis, bertemunya pembeli dan penjual karena basis bahan baku, tingkat hunian dan kecenderungan pengembangan kota.

Ditinjau dari bahan baku, daerahnya makin meluas saja karena perubahan teknologi angkutan yang makin canggih. Ditinjau dari tingkat hunian, maka perkembangan Binjai menjadi kota yang makin besar. Kecenderungan perkembangan kota mengarah ke segala arah, bahkan menjangkau jarak dengan kota-kota sekitarnya (Medan). Gejala tersebut telah nampak pada fakta keluasan Binjai pada akhir abad ke-20 ini yang telah menggejala menjadi sebuah kota. Aneka pasar juga muncul di Binjai. Pada pasar yang terletak di tengah kota, maka terdapat interaksi Tionghoa dan masyarakat pribumi yang *intens*. Pada pasar yang khusus menjajakan barang tertentu atau pasar di pinggir-pinggir kota maka kurang terdapat hubungan yang intens antara Tionghoa dan pribumi.

2. Posisi Sosial Ekonomi Orang Tionghoa.

Sejak tahun 1961, dalam bukunya *Hoa Kiau* di Indonesia, Pramoedya Ananta Toer telah mensinyalir posisi sosio ekonomi ini. Menurut Toer (1961:15) menyatakan bahwa : pengusaha Tionghoa (Istilah Toer dengan *Hoa Kiau*) mendapat kedudukannya bukan dengan serta merta, tetapi melalui perkembangan sosial yang panjang di tengah sejarah masyarakat Indonesia. Pedagang Tiongkok telah mulai berada di Indonesia (Nusantara) sejak awal mula sebelum ada proses perdagangan dengan Tiongkok. Mula-mula sebagai misi-misi kerajaan, misi keagamaan, dan misi-misi lain non perdagangan. Jadi keunggulan jati diri hubungan antara Tiongkok dan Indonesia (Nusantara) telah ada. Jati diri ini lahir lebih dahulu dari pada jiwa ekonomi perdagangan antara dua bangsa muncul.

Ketika masa perdagangan muncul, baik yang tradisional dan modern, maka para pedagang Tiongkok ini mendapatkan tempat di lubuk hati manusia Indonesia berupa ekonomi industri, perdagangan, pertanian, kerajinan, dan sebagainya. Sekaligus

pengaruh pada dunia sastra, literatur, kebudayaan daerah berdasarkan eksistensi dan kehidupan para pedagang Tiongkok di tengah-tengah masyarakat besar Indonesia. Terlebih-lebih dengan kedatangan orang Barat (Eropa), maka ada posisi lowong, sebagai kelas perantara terbuka lebar bagi pedagang Tiongkok. Dengan demikian semacam terdapat pembagian peran kala itu, dimana orang-orang Eropa yang berperan sebagai eksportir dan importir, warga pribumi sendiri berperan sebagai petani nelayan, pedagang eceran, sedangkan peran warga etnis Tionghoa berada diposisi tengah-tengah sebagai pedagang perantara.

Secara ringkas dapat disimpulkan perubahan struktur yang terjadi sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia, menjadikan perubahan fungsi orang Tionghoa dalam sosial ekonomi, meskipun nilai-nilai positif dan nilai negatif menyertai peranan pengusaha Tionghoa tersebut. Pengaruh positif dan negatif tersebut nampak hingga hari ini dalam fungsi pengusaha Tionghoa di tengah masyarakat besar Indonesia.

3. Masyarakat Tionghoa Dalam Perekonomian dan Perdagangan Di Kota Binjai 1968-2008.

Sejarah Indonesia modern pasca kejatuhan Presiden Soekarno, secara politis digantikan oleh pemerintahan baru, yang kemudian dikenal sebagai rezim Orde Baru. Sebutan Orde Baru semula hanya untuk membedakan dengan yang sebelumnya, yaitu Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto, seorang yang berlatar belakang militer dan dalam perjalanan kekuasaannya menerapkan suprastruktur politik yang menekankan pada oligarki politik, korporatisme otoriter, ekonomi-kapitalistik terpusat. Praktik kekuasaan Orde Baru yang demikian itu membutuhkan infrastruktur ekonomi dan politik yang kuat untuk menopang kekuasaannya.

Dalam hal ekonomi diterapkan korporatisme otoriter dan pendekatan ekonomi-kapitalistik secara terpusat. Keadaan ini akhirnya mendorong munculnya pemusatan kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu, yang semuanya berbasis pada kepentingan akumulasi kapital dan penguasaan jaringan ekonomi, baik dalam jalur vertikal maupun horisontal. Kelompok tertentu itu terdiri dari keluarga Soeharto, elite militer, elite birokrasi, dan elite ekonomi dari kalangan etnis Tionghoa.

Masyarakat etnis Tionghoa dimasukkan dalam jaringan ekonomi secara luas, karena secara politik pemerintahan Soeharto membatasi ruang gerak etnis ini pada bidang lain. Politik ini sama seperti terjadi pada masa kolonial, ketika itu etnis Tionghoa diletakkan secara sosiologis sebagai golongan perantara, yang berperan dalam akses ekonomi dan perdagangan. Walaupun,

kenyataannya cukup banyak dari kalangan etnis Tionghoa yang muncul secara fenomenal di luar bidang ekonomi, misalnya di bidang olah raga, keilmuan, seni, hukum, pers, politik. Namun, persepsi sebagai elite ekonomi yang menguasai mayoritas perputaran kapital dan jaringan perdagangan merupakan realitas yang tidak terelakkan.

Elit ekonomi ini telah lama memegang kunci jaringan ekonomi dan perdagangan sejak masa kolonial Belanda. Elite ekonomi ini kemudian muncul sebagai kelas berkuasa, yaitu kelas yang menguasai infrastruktur ekonomi, yang kemudian dikenal sebagai konglomerat. Dari sinilah kemudian timbul kekuatan ekonomi yang secara mayoritas dikuasai oleh orang Tionghoa, yang menguasai jaringan ekonomi mulai dari atas ke bawah. Dalam hal politik, rezim Orde Baru menerapkan sistem partai tunggal (Golkar), walaupun pada kenyataannya ada PPP dan PDI. Namun, dua partai ini tidak mampu mengimbangi kekuatan mayoritas di tubuh Golkar yang didukung oleh tentara, birokrasi, dan massa rakyat yang dimobilisasi di bawah tekanan dan ancaman. Keadaan ini disebut sebagai oligarki politik, yaitu kekuasaan yang ditopang oleh mekanisme politik otoriter di tangan seseorang dengan kroni-kroninya. Dari basis politik itu, maka segala aktivitas massa rakyat di bawah kendalinya secara otoriter, termasuk di dalamnya aktivitas perekonomian.

Dari posisi etnis Tionghoa yang merupakan representasi elite ekonomi di Indonesia seperti dijelaskan di atas, maka muncul persepsi mendasar bahwa hampir semua sumber daya ekonomi berada dalam kekuasaannya. Ini bisa terjadi, karena adanya kebijakan pemerintah yang sengaja memposisikan etnis Tionghoa hanya dalam bidang ekonomi. Akibatnya muncul persepsi stereotipe bahwa etnis Tionghoa sebagai "*economic animal*", yaitu orang yang hanya mencari uang dan untung.

Orang Tionghoa menjadi etnik terdepan dalam penguasaan jaringan ekonomi-perdagangan, selain disebabkan fasilitas politik Orde Baru juga secara mendasar disebabkan budaya dagang etnis Tionghoa. Budaya ini diwarnai oleh semangat kapitalistis yang didasarkan pada kekeluargaan: pemupukan modal dan kekayaan dari keluarga, oleh keluarga dan untuk kepentingan dan keamanan, keluarga. Budaya ini dipengaruhi oleh nilai Konfusianisme, yang menyatakan bahwa tujuan hidup individu adalah menciptakan keutuhan, keharmonisan dan keamanan keluarga. Ajaran moral tersebut dianggap sebagai pedoman efisiensi ekonomi. Posisi yang stereotipe itu sebenarnya telah mulai dibongkar seiring dengan perkembangan sosial politik pasca Orde Baru. Gejala ini memperlihatkan bahwa etnis Tionghoa ingin memainkan peran-

peran sosial-budaya secara luas. Keinginan itu pada dataran lebih luas sebagai relasi dari penguasaan ekonomi di satu pihak dan representasi identitas kelas elite ekonomi di pihak lain.

4. Bentuk Perdagangan Masyarakat Etnis Tionghoa

Dalam konstruk pasar di Binjai, kalangan etnik Tionghoa Binjai memperlihatkan fenomena tersendiri. Hal ini tampak jelas pada lapis-lapis konstruk pasar, mulai dari usaha besar hingga menengah, hampir semua didominasi oleh orang Tionghoa. Atas gejala ini, akhirnya timbul persepsi kuat bahwa orang Tionghoa merupakan etnik terbesar dalam kapasitasnya sebagai 'pemain tunggal' di dalam pasar di Binjai. Kelompok ini kemudian membangun diri menjadi semacam agen-agen, maesinas atau patronase dalam dunia perdagangan. Kehadiran orang Tionghoa dalam dunia perdagangan perekonomian di Binjai, sebenarnya telah cukup lama. Realitas ini terus berlangsung hingga saat ini.

Pada pemerintahan Orde Baru, yaitu ketika titik-titik pertumbuhan ekonomi dikuasai oleh orang Tionghoa. Mereka dengan jaringan bisnisnya menguasai infrastruktur, bahkan dalam banyak hal, karena pengaruh penguasaan kapital, mereka dapat mempengaruhi suprastruktur kota. Dua pengaruh besar inilah, yang pada gilirannya memunculkan kelompok elit ekonomi, yang secara politis ikut mempengaruhi arah kebijakan ekonomi, tetapi juga berdampak pada munculnya tegangan-tegangan sosial. Tegangan sosial itu sebenarnya merupakan akumulasi dari berbagai prasangka terhadap orang Tionghoa yang telah terbentuk sejak lama, bahkan sejak masa kolonial.

Memang, dalam beberapa kasus, tegangan sosial itu menjurus pada diskriminasi orang Tionghoa, yang pada akhirnya mengakibatkan tindakan kontra-produktif. Tegangan itu di satu pihak (berhubungan dengan kepentingan ekonomi) orang Tionghoa dapat hadir secara fenomenal, tetapi di pihak lain (berhubungan dengan kepentingan non-ekonomi) orang Tionghoa dikaburkan kehadirannya. Akibatnya, sekali lagi, orang Tionghoa sering mendapatkan citra yang hampir dipahami secara stereotipe sebagai binatang ekonomi, yang serakah, eksploitatif, bahkan manipulatif. Persoalan ini dapat dilihat dengan adanya campur tangan pemerintah terlalu banyak sehingga menimbulkan tumbuhnya pencari rente di kalangan birokrat pemerintah, sehingga wiraswastawan sesungguhnya tidak dapat berkembang. Kemudian dia juga menimbulkan kekuatan ekonomi pengusaha-pengusaha Tionghoa, yang melalui koneksinya dengan para birokrat negara, berhasil memperoleh fasilitas-fasilitas khusus bagi usahanya. Selanjutnya pada masa Orde Baru perdagangan di kota Binjai hampir tidak di dukung dengan perkembangan teknologi

yang memadai. Akibatnya, tidak terjadi industrialisasi yang mandiri. Sehingga kebanyakan hanya bergerak di bidang jasa, walaupun bergerak di bidang industri, dia hanya berperan sebagai komprador (bertindak sebagai agen industri manufaktur asing di negerinya sendiri).

Praktik ekonomi yang mengandalkan campur tangan kekuasaan birokrasi pemerintah dan politik yang berlebihan, pada akhirnya mengakibatkan ekonomi biaya tinggi, karena para pengusaha harus menyediakan dana untuk memperlancar usahanya. Dari sini maka timbul saling ketergantungan antara keduanya. Para elite penguasa perlu biaya besar untuk mempertahankan kekuasaannya, dengan demikian perlu membangun kerjasama dengan elite pengusaha. Sementara, para pengusaha perlu mendapatkan perlindungan politik dalam memainkan model ekonomi yang mendominasi dari hulu ke hilir, maka diperlukan kedekatan mereka dengan elite penguasa guna membangun kerajaan bisnisnya. Sementara itu, dalam kasus Indonesia, misalnya, para elite penguasa dipegang oleh masyarakat pribumi, sedangkan elite pengusaha dipegang oleh masyarakat etnik Cina. Para elite penguasa kebanyakan berasal dari etnik mayoritas, sementara para elite pengusaha berasal dari etnik minoritas. Di satu pihak (mayoritas) menguasai jaringan birokrasi dan kebijakan politik nasional, sementara di pihak lain (minoritas) mengendalikan perputaran roda ekonomi dengan jejaring kapitalnya yang sangat besar.

Perilaku ekonomi etnis Tionghoa di Indonesia khususnya di Kota Binjai dipengaruhi oleh persepsi mereka tentang situasi dan kondisi politik, hankam dan sosial masyarakat. Dimana persepsi individu ataupun sekelompok orang merupakan suatu proses dimana individu atau suatu kelompok mengorganisir dan menerjemahkan kesan sensorik mereka untuk memberikan tanda bagi lingkungan mereka. Terlepas dari pengukuran seseorang berjiwa nasionalis ataupun bukan, hal ini terkait dengan salah satu kebutuhan dasar hidup manusia yaitu menyangkut keselamatan dan keamanan etnis Tionghoa di Indonesia.

Selain itu persepsi tentang etnis Tionghoa di Indonesia juga tergantung stereotipe yang beredar di kalangan masyarakat pribumi tentang etnis ini. Pembentukan persepsi tentang etnis Tionghoa di Indonesia terkait dengan karakteristik pribadi mereka, terutama dalam menyikapi situasi lingkungan yang mereka hadapi, dengan motivasi tertentu terutama untuk mendapatkan keamanan dan kesejahteraan hidup, bahkan kemapanan. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh latar belakang pengalaman masa lampau, yang

merupakan dasar untuk melangkah maju meraih harapan-harapan hidup mereka di masa kini dan yang akan datang.

Pada Tahun 1941 sampai Tahun 1958, secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam sektor ekonomi utama, seperti manufacture, perkebunan, industri tekstil dan lain-lainnya. Muncul perubahan peran ekonomi etnis Tionghoa, yang saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor yang waktu itu masih didominasi Belanda. Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, dan muncul juga dalam industri pertekstilan (Mackie, 1991:322-323). Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan angkatan bersenjata, secara kuantitas hampir tidak ada.

Terjadi pergeseran peran dari tenaga “kasar” (misalnya sebagai kuli perkebunan) menjadi tenaga kerja “halus” yang pekerjaannya memiliki status atau “gengsi” yang lebih tinggi dan lebih membutuhkan keterampilan, misalnya penata rambut, pengrajin emas, wartawan, dokter, pengacara dan lain-lain. Sehingga, pada jaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin, peran ekonomi etnis Tionghoa meluas, lebih-lebih dengan adanya kebijakan Benteng yang membuat usaha pribumi tidak berjalan efektif dan memacu hubungan “Ali-Baba”, serta terjadi persaingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi lainnya.

Perilaku ekonomi etnis Tionghoa semakin menonjol pada periode ini, lebih-lebih tahun 1957 sampai tahun 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, walaupun kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka, lebih-lebih setelah peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965. Pada masa itu, etnis Tionghoa kelas menengah melakukan human capital besar-besaran dibidang pendidikan terutama yang bersifat teknis dan manajerial, sehingga pada saat terjadi inflasi tinggi dan perasaan anti etnis Tionghoa menyebar luas hingga tahun 1966, etnis Tionghoa dapat beradaptasi dengan fleksibel. Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan modal dan valuta asing yang didapat dari modal sendiri atau keluarga dan atau jaringan dengan pihak luar. Kunci utama keberhasilan pelaku ekonomi baru etnis Tionghoa, adalah merintis kedekatan dengan pejabat pemerintah pada awal Orde Baru sebagai pembinaan hubungan secara ekonomi dan politis. Walaupun demikian, orang Tionghoa tidak banyak yang terjun secara terbuka dalam politik praktis saat itu, mereka melakukannya lewat dukungan material dan non material.

Pada tahun 1965 sampai tahun 1968 merupakan tahun-tahun dimana tindakan kekerasan terhadap etnis Cina meningkat akibat peristiwa Gerakan 30 September, yang oleh rezim Soeharto diatasi secara gradual. Situasi kondusif bagi pertumbuhan perekonomian dirangsang oleh pemerintah Orde Baru, yang tentunya membutuhkan lebih banyak usaha, dan modal swasta. Secara kebetulan, kedua hal tersebut banyak dimiliki oleh etnis Tionghoa dan ditunjang pula oleh kemampuan teknis dan hubungan perekonomian dengan pihak luar negara, terutama dengan sesama etnis Tionghoa di luar negara. Akibatnya, kebanyakan etnis Tionghoa mengalami peningkatan status sosial ekonomi daripada kondisi sebelumnya. Namun demikian, mereka masih dikesampingkan dari usaha-usaha perekonomian utama, dan terdiskriminasi untuk memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, administrasi sipil pemerintah dan perguruan tinggi negara.

Dampak dari perlakuan diskriminatif ini adalah terjadinya pembagian kerja yang bersifat pri dan non pri (bumi). Perubahan peran ekonomi cenderung menghambat kerjasama ekonomi yang lebih kuat sejak pasca perang kemerdekaan Republik Indonesia. Menurut Mackie (1991: 327-328), para etnis Tionghoa akhirnya lambat laun mengganti identitasnya menjadi identitas Indonesia, terutama disebabkan atas alasan peran ekonomi mereka. Munculnya perusahaan-perusahaan yang dikuasai etnis Tionghoa berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha pribumi untuk bekerjasama dalam korporatisasi perusahaan-perusahaan. Efek negatif yang muncul adalah semakin tajamnya persaingan usaha pri dan non pri (bumi).

Pada Tahun 1986 sampai 1997 merupakan masa keemasan bisnis etnis Tionghoa di Indonesia, terlebih-lebih bagi yang dekat dengan “Keluarga Cendana”. Etnis Tionghoa mengokohkan diri sebagai salah satu pilar penyangga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Tionghoa lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak luar negara menjadi point istimewa perilaku ekonomi etnis Tionghoa di tahun-tahun ini. Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Cina kelas menengah dan atas.

Akan tetapi, pembangunan ekonomi juga kemapanan hidup yang didengungkan dan dibanggakan Orde Baru, bagaikan suatu menara gading yang dasar konstruksi tidak kuat, maka terjadi keruntuhan rezim dan kemapanan hidup yang “menyakitkan”

dengan adanya krisis moneter. Kalangan bawah “bergerak” karena ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial dan ekonominya, serta sikap anti kemapanan, yang salah satunya tercetus dalam bentuk kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan berupa penghancuran toko-toko serta pusat perdagangan terutama yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Hal ini ikut mendorong jatuhnya mantan Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan.

Kerusuhan Mei 1998, juga berpengaruh pada sikap anti etnis Tionghoa terutama yang memiliki usaha. Orang Cina yang trauma akibat kerusuhan Mei 1998, banyak yang lari ke luar negara, dan sebagian ada yang melarikan modal ke luar negara. Usaha-usaha niaga etnis Cina di kota-kota besar banyak yang vakum, dan baru mulai bangkit setelah ada jaminan keamanan dari mantan Presiden Habibie. Pelaku ekonomi etnis Cina hanya menunggu perkembangan keadaan.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kedatangan masyarakat etnis Tionghoa secara besar-besaran ke Kota Binjai diawali dengan pembangunan perkebunan tembakau di Deli, Langkat dan Serdang (1864–1870). Di Binjai mereka memulai kehidupannya baik sebagai kuli, juru masak, jongos, kerani hotel maupun sebagai pedagang yang berasal dari suku Pundi, Hakloe, Hokkian, Hailam dan Hakka.

Bentuk dan peranan masyarakat etnis Tionghoa dalam perdagangan perekonomian di Kota Binjai pada tahun 1968-2008 adalah kontekstual dengan fungsi eksistensi. Dalam fungsi tersebut, ada unsur positif dan negatif yang muncul, antara masyarakat etnis Tionghoa dan Bumi Putera, secara timbal balik. Fungsi tersebut berkait dengan peran positif dan peran negatif yang sangat dibiarkan oleh sejarah, lingkungan, prasangka, dan masalah-masalah sektoral berdasar kepentingan sesaat atau lokal. Peran dan posisi etnis Tionghoa yang beroperasi di dunia perdagangan perekonomian tersebut pada dataran lebih luas memperlihatkan identitas yang hendak dibangun. Dimana identitas ini terkait dengan ideologi, kuasa ekonomi, kultur dagang, budaya, dan posisi stereotipe yang telah berlangsung lama.

Adapun saran-saran yang diajukan sesuai dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Melalui penulisan skripsi ini, peneliti mengharapkan agar masyarakat pribumi dapat menerima kehadiran masyarakat Tionghoa ditengah-tengah lingkungan kita. Dengan tidak mendiskreditkan atas kesuksesan usaha yang mereka raih, 2) Masyarakat Tionghoa selaku kelompok minoritas selayaknyalah dapat membuka diri dengan masyarakat

dimana mereka tinggal. Agar terwujud integritas yang harmonis antar masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. 1992. *Ekologi Manusia Dan Konsep Kebijakan Industrialisasi Dalam Prosiding*. Makalah pada Seminar Pendekatan Ekologi Manusia Dalam Menyongsong Era Industrialisasi Menjelang PJPT II Jakarta, Desember 1992. Jakarta, Komphalindo
- Anderson, Benedict. 1982. *Perspective and Method in American Research on Indonesia dalam Benedict Anderson dan Audrey Kahin, Interpreting Indonesian Politics Thirteen Contribution to The Debate*. Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, Inter im Report Series No. 62.
- Burger, Jane C Ollen dan Hellen A More. 2002. *Sosiologi*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Ch'ng, David C.L.. 1995. *Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Praktek Bisnis dan Jaringan Internasional. Penerjemah, Stephen Suleeman*. Pustaka Utama Grafiti.
- Kunio, Yoshihara.1987, *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta, LP3ES.
- Nasikun, Dr. 1995. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Mackie, J.A.C. 1991. *Peran ekonomi dan identitas etnis Cina Indonesia dan Muangthai dalam Wang Gung Wu dan Jennifer Cushman, Perubahan Identitas Orang Cina di Asia Tenggara*. Jakarta: Pustaka Utama Grafika.
- Meleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung, Rosda Karya.
- Parken, SR dan Brown RK. 1995. *Sosiologi Industri*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Pelzer, Karl Z. 1985. *Toeian Keboen Dan Petani, Politik Kolonial Dan Perjuangan Agraria Di Sumatera Timur 1863–1947*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.
- Purnama, Andi. 2007. *Peranan Tjong A Fie Dalam Pembangunan Kota Medan 1886-1921*. Skripsi Jurusan Pendidikan Sejarah FIS-UNIMED
- Redding, S Gordon. 1994. *Jiwa Kapitalisme Cina*. Jakarta: Abdi Tandur
- Setiono, Benny G. 2002. *Tionghoa dalam Pusaran Politik*. Jakarta: Elkasa
- Sjamsuddin, Helius. 2007. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak